



Pemanfaatan Teknologi (SIREKAP) Dalam Meningkatkan Kinerja KPU Bekasi Pada PILKADA 2024

Affif Fauzi¹, Iwan Kurniawan Subagja², Azis Hakim³

¹Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, Afiffauzi479@gmail.com

²Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, iwankurniawan@unkris.ac.id

³Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, dr_azishakim@yahoo.com

Corresponding Author: Afiffauzi479@gmail.com¹

Abstract: Digital transformation in election administration has become a strategic imperative for realizing transparent, accountable, and efficient elections. The Bekasi City General Election Commission (KPU) utilized the Recapitulation Information System (SIREKAP) as a technological innovation in the vote recapitulation process during the 2024 Regional Head Election (PILKADA). This research aims to analyze KPU officers' technology acceptance of SIREKAP based on the Technology Acceptance Model (TAM) and to evaluate its contribution to organizational performance through a Balanced Scorecard (BSC) approach. The method employed was a descriptive qualitative approach. The findings indicate that strengthening perceptions of the technology's usefulness and ease of use contributed to improved institutional readiness. SIREKAP also had a positive impact on recapitulation efficiency, transparency of results, and human resource capacity. To support the sustainability of digital transformation, systemic evaluation and continuous strengthening of technical aspects are essential.

Keyword: SIREKAP, 2024 Regional Election, Technology Adoption, Organizational Performance

Abstrak: Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan pemilihan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi memanfaatkan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai inovasi teknologi dalam proses rekapitulasi suara pada PILKADA 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan teknologi SIREKAP oleh petugas KPU berdasarkan model *Technology Acceptance Model* (TAM) serta mengevaluasi kontribusinya terhadap kinerja organisasi melalui pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi berkontribusi pada peningkatan kesiapan kelembagaan. SIREKAP juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi rekapitulasi, transparansi hasil, serta kapasitas SDM. Untuk mendukung keberlanjutan transformasi digital, diperlukan evaluasi sistemik dan penguatan aspek teknis secara berkelanjutan.

Kata Kunci: SIREKAP, PILKADA 2024, Penerimaan Teknologi, Kinerja Organisasi

PENDAHULUAN

Sebagai metode demokratis untuk memilih pemimpin dan perwakilan rakyat Indonesia, Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memiliki hubungan yang erat. Jika Pemilu mengacu pada pemilihan di tingkat nasional, Pilkada dimaksudkan untuk memilih pemimpin daerah meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.(Wilma Silalahi, 2022) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 adalah salah satu momen penting dalam praktik demokrasi di Indonesia. Integritas, transparansi, dan kebenaran hasil pemungutan suara sangat krusial demi keberhasilan Pilkada. Seiring dengan kemajuan teknologi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menghadirkan inovasi baru untuk memastikan proses Pilkada berjalan sukses, transparan, dan efisien. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkenalkan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai inovasi teknologi untuk mendukung proses rekapitulasi suara secara digital (Putra & Fatchuriza, 2025). SIREKAP bertujuan untuk mempercepat proses rekapitulasi, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat transparansi hasil pemilu.

Namun, implementasi SIREKAP pada Pemilu 2024 menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya pelatihan bagi petugas pemilu, serta resistensi terhadap perubahan dari metode manual ke digital. Elemen non-teknis seperti komunikasi yang baik antar pihak terkait, dedikasi dan sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang ada juga berperan dalam keberhasilan atau kegagalan implementasi SIREKAP. (Azzahri, 2024) Proses implementasi mungkin menghadapi tantangan karena keterbatasan anggaran, pelatihan, dan fasilitas, yang dapat memengaruhi kecepatan dan akurasi penghitungan suara. Mengingat SIREKAP adalah sistem yang relatif baru, implementasinya memerlukan pemahaman mendalam tentang kesiapan daerah dalam menghadapi kemajuan teknologi (Angelina & Nawangsari, 2025) . Evaluasi terhadap penggunaan SIREKAP pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada penerimaan dan kesiapan pengguna dalam mengadopsi teknologi tersebut.

Dalam konteks ini, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi menjadi penting. Model Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) mengidentifikasi dua faktor utama yang memengaruhi penerimaan teknologi, yaitu persepsi terhadap kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi terhadap kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). (Davis, 1989) Model ini telah digunakan secara luas untuk menganalisis adopsi teknologi di berbagai sektor, termasuk sektor publik . Selain itu, untuk mengevaluasi dampak implementasi teknologi terhadap kinerja organisasi, pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton (1992) dapat digunakan. BSC memungkinkan evaluasi kinerja organisasi dari empat perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan & Norton, 2005). Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai bagaimana implementasi teknologi seperti SIREKAP memengaruhi berbagai aspek kinerja organisasi.

Dengan mempertimbangkan evaluasi terhadap penggunaan SIREKAP pada Pemilu 2024 dan rencana implementasinya pada PILKADA 2024, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerimaan teknologi oleh pengguna memengaruhi efektivitas implementasi SIREKAP dan dampaknya terhadap kinerja KPU Bekasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi implementasi teknologi informasi yang efektif dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana penelitian ini berasal dari pendekatan inkuiiri naturalistik di mana data diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang ada (Suwandi, 2008), yakni tentang Penggunaan aplikasi SIREKAP oleh KPU Kota Bekasi. Kemudian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana fokusnya terletak pada pemaparan dan penjelasan mendalam terhadap data yang dikumpulkan. Hal ini mencakup berbagai konsepsi dan pendapat yang relevan dengan topik penelitian (Kasiram, 2010). Menganalisis penerimaan teknologi SIREKAP oleh KPU Kota Bekasi dalam penyelenggaraan PILKADA 2024 dengan menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM), khususnya dalam hal *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* oleh pengguna internal dan Mengevaluasi dampak implementasi SIREKAP terhadap kinerja kelembagaan KPU Kota Bekasi berdasarkan perspektif *Balanced Scorecard* (BSC), meliputi dimensi proses internal, perspektif publik, pembelajaran dan pertumbuhan, serta efisiensi keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Penggunaan SIREKAP pada PEMILU 2024

Setelah selesainya seluruh tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, secara formal, tidak melaksanakan evaluasi komprehensif terkait penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Absennya evaluasi formal ini mungkin menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas sistem yang menjadi tulang punggung rekapitulasi suara Pemilu 2024. Meskipun demikian, indikasi adanya permasalahan dalam implementasi Sirekap muncul dalam beberapa sesi penutupan kegiatan Pemilu 2024. Para komisioner KPU Kota Bekasi, dalam kesempatan tersebut, sempat memberikan himbauan dan koreksi signifikan terkait tata cara penggunaan Sirekap. Himbauan dan koreksi ini, meskipun tidak dikemas dalam format laporan evaluasi resmi, secara implisit menunjukkan pengakuan internal bahwa Sirekap memang masih mengalami sejumlah kendala dan memerlukan perbaikan. Hal ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan, sistem Sirekap belum sepenuhnya berjalan mulus, mengindikasikan adanya celah yang perlu ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang (Ratnasari, 2025).

Pada 2 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Kegiatan ini diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta, dan diikuti oleh jajaran penyelenggara pemilu dari berbagai tingkatan, mulai dari Provinsi hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tujuan utama dari Bimtek ini adalah untuk memastikan pemahaman menyeluruh terhadap sistem kerja SIREKAP, baik modul *Mobile* maupun *Web*, serta membangun koordinasi teknis yang solid antarwilayah. SIREKAP diposisikan oleh KPU RI bukan sebagai sistem mandiri, melainkan sebagai alat pendukung krusial untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi rekapitulasi suara. Ketua KPU RI, Mochammad Affuddin, menekankan bahwa kolaborasi antara Divisi Teknis dan Divisi Data dan Informasi (Datin) merupakan kunci utama agar proses pengumpulan, validasi, dan pengunggahan data suara dapat berlangsung tanpa hambatan. Selain itu, Bimtek juga dirancang untuk menciptakan kaderisasi pengetahuan, di mana peserta diharapkan mampu melakukan *transfer of knowledge* kepada jajaran penyelenggara di wilayah masing-masing, termasuk melalui simulasi dan uji coba langsung terhadap kedua modul aplikasi (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024).

Dalam konteks lokal, KPU Kota Bekasi sebagai salah satu entitas penyelenggara di tingkat kabupaten/kota turut mengambil bagian dalam agenda nasional ini. Namun, berdasarkan hasil evaluasi teknis yang dilakukan secara internal, terdapat beberapa catatan

penting yang menggambarkan gap antara standar nasional yang ditetapkan KPU RI dengan realitas implementasi di lapangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh KPU Kota Bekasi adalah belum optimalnya pemerataan pemahaman teknis di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Meskipun pelatihan telah diberikan di tingkat kota, penyampaian materi ke jenjang bawah seperti PPS dan KPPS belum dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur. Hal ini berdampak pada kurangnya kesiapan personel KPPS dalam mengoperasikan SIREKAP Mobile, terutama saat melakukan pemindaian formulir C. Hasil dan pengunggahannya ke server pusat. Selain itu, KPU Kota Bekasi juga menghadapi kendala infrastruktur, seperti keterbatasan sinyal internet di beberapa TPS dan keterlambatan respons aplikasi saat proses sinkronisasi data ke SIREKAP Web. Hambatan teknis ini menunjukkan bahwa kesiapan perangkat keras dan jaringan belum sepenuhnya mendukung operasionalisasi sistem sebagaimana diharapkan. Padahal, salah satu poin krusial dalam arahan Bimtek Nasional adalah perlunya simulasi dan uji coba sistem secara berulang untuk memastikan stabilitas teknis sebelum hari pemungutan dan rekapitulasi suara (Ratnasari, 2025).

Dari perspektif konseptual, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM). Model ini menyatakan bahwa penerimaan teknologi oleh pengguna sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kemudahan penggunaan dan kegunaannya. Dalam konteks KPU Kota Bekasi, persepsi positif terhadap SIREKAP belum sepenuhnya terbentuk akibat kurangnya pengalaman langsung, pelatihan yang tidak merata, serta kegagalan sistem yang berulang. Di sisi lain, dari kerangka *Balanced Scorecard* (BSC), penggunaan SIREKAP memiliki implikasi strategis dalam dimensi proses bisnis internal dan pembelajaran organisasi, di mana proses digitalisasi ini seharusnya mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan publik dalam pemilu. Dengan demikian, korelasi antara arahan strategis nasional yang disampaikan dalam Bimtek SIREKAP dan implementasi teknis di Kota Bekasi menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya sistematis untuk menjembatani kesenjangan kapasitas teknis dan operasional. KPU Kota Bekasi perlu memperkuat pelatihan berjenjang, melakukan evaluasi infrastruktur digital secara menyeluruh, serta menjalankan simulasi sistem secara berkala dan terukur. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa penggunaan SIREKAP dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap integritas serta efisiensi dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Penerimaan Teknologi Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM)

Berdasarkan temuan pasca-Pemilu 2024 di Kota Bekasi, persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) SIREKAP oleh petugas KPU masih dipengaruhi oleh keandalan sistem dalam memecahkan masalah nyata. Meskipun arahan korektif dari komisioner pada penutupan pemilu mengakui potensi teknologi ini—khususnya dalam mempercepat proses rekapitulasi dan meningkatkan akurasi data—kendala seperti ketidaksesuaian perangkat keras di tingkat KPPS dan infrastruktur jaringan yang tidak stabil menurunkan keyakinan petugas akan manfaat tersebut.(Davis, 1989) Selain itu, rendahnya kualitas gambar dokumen suara—sering kali buram atau gelap—mengganggu proses pengenalan karakter optik (OCR) sehingga memperberat beban verifikasi manual dan semakin menurunkan persepsi kegunaan SIREKAP.(Wigita et al., 2024)

Dari segi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) nasional pada 2 Oktober 2024 di Hotel Borobudur menunjukkan bahwa pelatihan satu arah belum cukup membangun kepercayaan dan keterampilan petugas dalam mengoperasikan SIREKAP. Bimtek yang meski terstruktur namun bersifat umum kurang mampu menjangkau kebutuhan spesifik di lapangan. Hal ini selaras dengan temuan Venkatesh dan Davis bahwa kemudahan penggunaan tidak hanya berkaitan dengan antarmuka, melainkan juga dukungan proses seperti pendampingan langsung dan dokumentasi interaktif. .(Ulfa Jamilatul Farida, 2022)

Beberapa faktor pendorong adopsi SIREKAP di Bekasi mencakup kesadaran petugas akan urgensi transparansi pemilu, dukungan administratif dalam bentuk arahan korektif, serta pelaksanaan simulasi dan Focus Group Discussion (FGD) internal. Di sisi lain, ketiadaan evaluasi formal menimbulkan kekurangan umpan balik terdokumentasi, sementara kendala teknis—termasuk perangkat tidak seragam, jaringan internet yang lemah, gangguan server, dan kualitas dokumen yang buruk—bertindak sebagai penghambat utama.(Saputra & Zaini, 2023).

Tabel 1. Penggunaan SIREKAP

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Himbauan korektif dari kepemimpinan KPU Bekasi	Ketiadaan evaluasi formal → kurangnya umpan balik terdokumentasi
Bimtek nasional terstruktur (Provinsi-TPS)	Perangkat KPPS tidak seragam / spesifikasi rendah
Simulasi dan FGD internal pasca-pemilu	Kualitas foto dokumen suara (buram, gelap)
Kesadaran akan transparansi publik	Gangguan server dan infrastruktur jaringan tidak stabil

Sumber: Data analisa riset

Implikasi dari temuan ini terhadap kesiapan kelembagaan KPU Kota Bekasi sangat mendalam. Pertama, perlu dibangun struktur pelatihan berjenjang yang menggabungkan modul Bimtek nasional dengan pendampingan lokal berkelanjutan untuk memperkuat *muscle memory* teknologi. Kedua, KPU Bekasi harus menetapkan spesifikasi minimum perangkat dan SOP pengambilan gambar dokumen suara yang baku, sehingga kualitas input memenuhi standar aplikasi. Ketiga, penerapan sistem monitoring dan feedback loop, seperti dashboard real-time dengan notifikasi otomatis atas kegagalan upload, akan memungkinkan intervensi cepat dan meningkatkan keandalan proses rekapitulasi. Terakhir, budaya evaluasi rutin—melalui FGD pasca-pemilu dan *post-mortem analysis*—harus menjadi agenda berkelanjutan agar setiap pelajaran lapangan terdokumentasi dan dijadikan dasar perbaikan berikutnya.(Venkatesh et al., 2003) Dengan mempraktikkan rekomendasi ini dan memperkuat kedua konstruk TAM—meningkatkan keandalan sistem untuk memperkuat *perceived usefulness* serta menyediakan dukungan proses untuk memperbaiki *perceived ease of use*—KPU Bekasi akan memperkokoh kesiapan kelembagaan dalam mengoperasikan SIREKAP secara optimal pada Pilkada 2024, sekaligus membangun fondasi bagi pemilu digital yang lebih akuntabel di masa mendatang.

Implementasi SIREKAP dalam PILKADA 2024 di Kota Bekasi

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024, Kota Bekasi turut mengimplementasikan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai bagian dari transformasi digital penyelenggaraan pemilu yang diusung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. SIREKAP dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses rekapitulasi suara secara digital. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan teknologi ini, KPUD Kota Bekasi bersama KPU RI melaksanakan serangkaian langkah peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan.

1. Langkah-langkah Peningkatan Kapasitas

KPU RI melaksanakan dua kali pelatihan uji beban server secara nasional, yang bertujuan untuk menguji ketahanan dan stabilitas sistem ketika digunakan secara bersamaan oleh seluruh daerah. Kegiatan ini menjadi penting karena SIREKAP membutuhkan infrastruktur digital yang andal, terutama saat terjadi lonjakan akses data selama proses rekapitulasi. Selain itu, KPUD Kota Bekasi juga melaksanakan satu kali pelatihan uji beban server di tingkat lokal sebagai upaya mengadaptasi sistem terhadap kondisi jaringan dan infrastruktur daerah. Langkah ini sejalan dengan konsep *capacity building* yang menekankan pada pentingnya kesiapan teknis dan SDM dalam menghadapi kompleksitas teknologi pemilu.(Widodo & Pahlevi, 2021)

Selain pengujian teknis, KPUD Kota Bekasi menyelenggarakan pelatihan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pelatihan ini difokuskan pada pemahaman teknis penggunaan aplikasi SIREKAP, termasuk simulasi proses unggah formulir C.Hasil-KWK dan validasi data. Setelah pelatihan tingkat kecamatan dan kelurahan, PPS melanjutkan proses transfer pengetahuan dengan melatih Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh PPK. Rantai pelatihan ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam memperkuat kapasitas penyelenggara pemilu di semua tingkatan, yang menjadi faktor krusial dalam keberhasilan penerapan sistem informasi digital seperti SIREKAP.(Putri et al., 2025)

Selain pelatihan, aspek penguatan infrastruktur juga menjadi bagian dari persiapan. KPUD Kota Bekasi memastikan ketersediaan jaringan internet di berbagai TPS, mengingat SIREKAP berbasis aplikasi daring yang memerlukan koneksi stabil. Namun demikian, tantangan teknis tetap muncul pada masa simulasi, seperti lamanya waktu unggah data ke server yang dapat memakan waktu satu hingga dua hari. Hal ini disebabkan oleh beban sistem yang tinggi dan belum optimalnya jalur komunikasi data, khususnya di beberapa wilayah yang memiliki keterbatasan akses jaringan.

2. Penerapan di Lapangan dan Pemanfaatan Data Digital

Pada hari pelaksanaan pemungutan suara, secara umum aplikasi SIREKAP berfungsi dengan baik di Kota Bekasi. Proses unggah hasil penghitungan suara dari TPS ke server pusat berjalan sesuai rencana. Namun, tercatat adanya kendala teknis di 55 TPS yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kualitas foto hasil formulir rekap yang buram dan keterlambatan unggah dokumen. Permasalahan ini menyebabkan data tidak langsung terbaca oleh sistem saat diakses melalui SIREKAP web. Sebagai langkah mitigasi, PPS dan PPK melakukan pengawalan proses unggah ulang di tingkat rekapitulasi penghitungan suara (RPS), sehingga data tetap dapat diproses dan diverifikasi tepat waktu (Amir, 2025).

Pemanfaatan data digital rekapitulasi melalui SIREKAP memberikan dampak signifikan dalam hal efisiensi waktu dan transparansi proses. Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memantau hasil secara real time melalui platform publikasi yang disediakan oleh KPU. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.(Degly et al., 2025) Namun, efektivitas pemanfaatan data digital sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur digital, dan kemampuan sistem dalam mengatasi kendala teknis secara cepat.

Dengan demikian, penerapan SIREKAP dalam PILKADA 2024 di Kota Bekasi mencerminkan kombinasi antara kesiapan teknis, pelatihan SDM, dan respons adaptif terhadap kendala di lapangan. Meskipun masih ditemukan beberapa tantangan teknis, secara umum implementasi ini dapat dikategorikan berhasil dalam mendukung proses rekapitulasi suara yang lebih efisien, akurat, dan transparan.

Dampak terhadap Kinerja KPU Berdasarkan Balanced Scorecard (BSC)

Model *Balanced Scorecard* menyediakan kerangka kerja strategis yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja organisasi publik(Kaplan & Norton, 2005) seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari perspektif internal, pelanggan (masyarakat), pembelajaran, serta pertumbuhan organisasi. Penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam PILKADA 2024 di Kota Bekasi memberikan ilustrasi nyata bagaimana teknologi berdampak terhadap setiap dimensi BSC.

1. Proses Internal: Efisiensi Waktu dan Akurasi Rekapitulasi

Implementasi SIREKAP secara signifikan meningkatkan efisiensi proses rekapitulasi suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke pusat. Dalam praktiknya, unggahan formulir C.Hasil-KWK dari aplikasi SIREKAP Mobile oleh KPPS ke server pusat

memungkinkan proses verifikasi awal dilakukan secara digital, mengurangi ketergantungan pada rekap manual yang memakan waktu dan rentan kesalahan.(Ricky, 2022)

Meskipun ditemukan hambatan teknis di 55 TPS—terkait kualitas dokumen yang buram dan lambatnya unggahan karena keterbatasan jaringan—strategi mitigasi seperti pengunggahan ulang oleh PPS dan PPK menunjukkan adanya respons sistemik yang adaptif. Dengan demikian, SIREKAP berhasil meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi rekapitulasi, dua indikator penting dari efisiensi proses internal.

2. Perspektif Publik (Pelanggan): Peningkatan Kepercayaan Masyarakat

Salah satu keunggulan utama dari digitalisasi proses rekapitulasi adalah peningkatan transparansi publik. Melalui platform *SIREKAP Web*, masyarakat dapat memantau hasil penghitungan suara secara real-time, menciptakan persepsi positif terhadap akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan PILKADA. Akses langsung ini berkontribusi pada penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi KPU dan proses demokrasi secara keseluruhan.(Sadam et al., 2024)

Namun demikian, kredibilitas data digital sangat bergantung pada validitas dokumen yang diunggah dan kecepatan sistem dalam menampilkannya. Maka, aspek teknis—seperti kualitas gambar, keterhubungan jaringan, dan stabilitas server—secara langsung memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keandalan sistem.

3. Pembelajaran dan Pertumbuhan: Penguatan Kapasitas SDM

Kinerja kelembagaan sangat ditentukan oleh kesiapan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM). Dalam konteks ini, KPU Kota Bekasi bersama KPU RI telah menunjukkan inisiatif progresif dengan melaksanakan pelatihan berjenjang kepada PPK, PPS, dan KPPS. Simulasi penggunaan SIREKAP, pelatihan uji beban server, serta sistem *transfer knowledge* dari kecamatan ke TPS merupakan bentuk nyata *capacity building* yang relevan dengan pilar pembelajaran dan pertumbuhan dalam BSC.(ULUM, 2018)

Namun, efektivitas pelatihan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek interaktif dan praktik langsung. Beberapa kendala lapangan—seperti kurangnya pemahaman terhadap tata cara pengambilan gambar formulir yang sesuai standar OCR—menunjukkan bahwa materi pelatihan masih dapat diperbaiki. Ke depan, pelatihan berbasis simulasi nyata dan pendampingan langsung perlu diperluas cakupannya.

4. (Opsional) Perspektif Keuangan: Efisiensi Anggaran Operasional

Meskipun tidak menjadi fokus utama, penerapan SIREKAP juga menunjukkan potensi penghematan anggaran operasional. Dengan mengurangi kebutuhan akan kertas, pengiriman fisik dokumen, dan rekapitulasi manual yang memerlukan logistik tambahan, KPU Kota Bekasi dapat mengalihkan sebagian besar anggaran ke aspek teknis seperti pelatihan dan penguatan infrastruktur. Digitalisasi ini juga memperkecil potensi pengeluaran tidak terduga akibat kesalahan rekap atau pengulangan proses verifikasi suara.(Tarina et al., 2024) Namun, efisiensi ini hanya optimal apabila infrastruktur dasar—termasuk jaringan internet dan perangkat keras—telah disiapkan dengan baik. Pengeluaran awal untuk investasi teknologi memang tinggi, tetapi akan memberi dampak penghematan jangka panjang jika sistem berjalan optimal.

KESIMPULAN

Pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam PILKADA 2024 oleh KPU Kota Bekasi mencerminkan kemajuan signifikan dalam transformasi digital penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan analisis kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM), keberhasilan implementasi SIREKAP ditentukan oleh persepsi pengguna internal

terhadap kegunaan sistem (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaannya (*perceived ease of use*). Upaya pelatihan teknis, penguatan infrastruktur digital, serta dukungan kelembagaan telah menunjukkan hasil positif terhadap penerimaan teknologi ini. Di sisi lain, evaluasi menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) mengungkapkan bahwa digitalisasi rekapitulasi suara melalui SIREKAP memberikan dampak positif pada beberapa dimensi kinerja strategis. Peningkatan efisiensi proses internal, transparansi hasil pemilu yang mendorong kepercayaan publik, serta penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berjenjang menjadi indikator keberhasilan adopsi teknologi. Kendati demikian, beberapa tantangan teknis seperti kualitas unggah dokumen dan stabilitas jaringan masih perlu disempurnakan.

REFERENSI

- Amir, F. I. (2025). *Wawancara tentang Implementasi SIAKBA dalam PILKADA 2024 di Kota Bekasi*. KPU Kota Bekasi.
- Angelina, G., & Nawangsari, E. R. (2025). Implementation Of Sirekap In The 2024 Simultaneous Regional Elections At The East Java Provincial KPU. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(1), 471–479. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v23i1.478>
- Azzahri, R. (2024). Tinjauan Kritis terhadap Penggunaan Aplikasi Sirekap dalam Proses Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024. *Prosiding: Resiliensi Indonesia Dalam Pusaran Disrupsi Globa*, 398–405. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1067>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Degly, M., Wea, A., & Muljanto, A. (2025). Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2024 Di Kabupaten Sidoarjo. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 3362–3370. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7925>
- Kaplan, R., & Norton, D. P. (2005). The Balanced Scorecard: measures that drive performance. *Harvard Business Review*, 83, 172–+.
- Kasiram, M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Uin Maliki Press.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024, October). *Sirekap Sebagai Alat Dukung Menunjang Proses Pilkada 2024*. Kpu.Go.Id. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12636/sirekap-sebagai-alat-dukung-menunjang-proses-rekapitulasi-pilkada-2024>
- Putra, R. A., & Fatchuriza, M. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kinerja Sirekap dalam Mendukung Pilkada Berintegritas di Kabupaten Kendal. *Journal Publicuho*, 8(1), 121–132. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.635> FAKTOR-FAKTOR
- Putri, J. A., Sari, N. Y., & Rahayuningtyas, F. D. (2025). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) Dalam Pemilu 2024. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 2(2), 351–360. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i2.1679>
- Ratnasari, E. (2025). *Wawancara tentang Evaluasi Penggunaan SIREKAP pada PEMILU 2024*. KPU Kota Bekasi.
- Ricky, R. (2022). Pengembangan studi tentang pemilu dan digitalisasi secara global dan tantangannya di Indonesia: Analisis Bibliometrik. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 132–139. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4123>
- Sadam, M., Araafi, F. Al, & Arafah, Y. (2024). Demokrasi Dan Transformasi Digital : Analisis Digitalisasi Politik Melalui Penerapan E-Voting Dalam Meningkatkan Mutu Demokrasi. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 1–23. <https://doi.org/10.14710/politika.15.2.2024.218-235>

- Saputra, E., & Zaini, K. (2023). Pengukuran Penerimaan Aplikasi e-Coklit Berdasarkan Persepsi PPK, PPS, dan Pantarlih Menggunakan Technology Acceptance Model. *Jurnal Pengembangan Sistem Informasi Dan Informatika*, 4(4), 46–64. <https://doi.org/10.47747/jpsii.v4i4.1422>
- Suwandi, B. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Tarina, U., Febrian, M. R., Prihastuti, I. C., & Nurcahya, W. F. (2024). Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Negara Dalam Pemilihan Umum. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 785–797. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.885>
- Ulfa Jamilatul Farida. (2022). Percepatan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Penguatan Penyelenggara Ad Hoc Untuk Pemilu Serentak 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(2), 207–231. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i2.654>
- ULUM, C. (2018). Manajemen E-Government dalam Rangka Capacity Building Birokrasi di Indonesia. *BISMA (Bisnis Dan Manajemen)*, 2, 167. <https://doi.org/10.26740/bisma.v2n2.p167-172>
- Venkatesh, V., Morris, M., Davis, G., & Davis, F. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27, 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Widodo, B. E. C., & Pahlevi, M. E. T. (2021). Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Ad Hoc Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Pengawas Pemilu DKI Jakarta*, March, 1–179.
- Wigita, R., Fauzi, E. A., & Yanur, M. (2024). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilu 2024. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 8(5), 560–567. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jkii/article/view/1872>
- Wilma Silalahi. (2022). Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Japhtn-Han*, 1(1), 67–79. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11>